

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

Gustini¹⁾; Rahmat Al Hidayat²⁾; M Bima Eka Putra³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Study Program of Administration Business

¹⁾²⁾³⁾ Department of Administration Business, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ stia_gustini@yahoo.com; ²⁾ yynrahmad@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 November 2024]

Revised [11 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

KEYWORDS

Capital Expenditure and Fixed Assets.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian adalah apakah belanja modal berpengaruh terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Penelitian merupakan jenis penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari catatan laporan keuangan APBD Provinsi Bengkulu serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan belanja modal dan aset tetap. Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis regresi linear sederhana, koefisien korelasi product moment dan pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, sedangkan tingkat kekuatan hubungan belanja modal terhadap aset tetap adalah kuat dan nilainya positif, artinya terdapat pengaruh yang searah antar variabel dimana kenaikan belanja modal maka akan diikuti kenaikan aset, sebaliknya penurunan belanja modal, diikuti penurunan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze the effect of capital expenditure on fixed assets Local Government Bengkulu Province. Research is a type of causal research with quantitative approach with the method of collecting secondary data obtained from the records of the financial statements Government Bengkulu Province Budgets and other documents relating to capital expenditure and fixed assets. In analyzing the data used descriptive quantitative method with a simple linear regression analysis, product moment correlation coefficients and hypothesis testing with the t test. The results showed that capital expenditure variable positive and significant effect on fixed assets Government Bengkulu Province, it means the direction is the direction of influence between variables, in which case the increase in variable capital expenditure will be followed by the increase of fixed assets Government Bengkulu Province

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:24). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Dikeluarkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam kenyataannya PAD belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari sistem tax assignment (pengungutan pajak) di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (Rosidin, 2010:230).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bengkulu adalah dengan pemanfaatan barang (aset) daerah. Dari pengertian tersebut setidaknya ada 5 bentuk pemanfaatan aset tetap milik pemerintah daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Contohnya adalah pemerintah daerah dan investor sepakat untuk membangun sebuah pasar di atas tanah milik pemerintah daerah, setelah bangunan pasar selesai dibangun kemudian investor selaku pihak yang menyediakan dana pembangunan pasar tersebut, ketika bangunan pasar selesai dibangun oleh investor dan siap dioperasikan, aset tersebut di serahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu terlebih dahulu, dan pengelolaan aset selanjutnya sangat tergantung dari kesepakatan kedua pihak, dimana pengelola aset dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri atau dilakukan oleh investor. Apabila diserahkan kepada investor maka aset tersebut dapat dikelola hingga akhir masa konsesi yang disepakati (menurut Permendagri 17 tahun 2007 paling lama 30 tahun, pasal 38 nomor 5). Di akhir masa konsesi, investor menyerahkan aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya untuk sewa guna bangunan contohnya adalah gedung balai buntar yang digunakan untuk resepsi pernikahan atau pertemuan. Jika aset daerah dimanfaatkan dan dapat didayagunakan secara optimal, maka akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber PAD, disamping itu dapat mengurangi beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dari segi pemeliharaan dan pengamanannya.

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output, outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Penafsiran atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset dineraca yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut termasuk didalamnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Disamping aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD ada aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

Didalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu masih terdapat permasalahan didalam belanja aset yaitu ;

1. Adanya perbedaan persepsi dalam penyusunan dan pengelompokkan belanja barang dan modal, sehingga sering dijumpai kesalahan penentuan elemen-elemen biaya yang dimungkinkan dikelompokkan dalam belanja barang dan belanja modal yang berakibat sering dijumpai adanya unsur belanja modal yang terdapat dalam kelompok belanja barang atau sebaliknya.
2. Dalam penyusunan Dokumen Anggaran penggunaan elemen-elemen biaya dalam kelompok belanja tertentu agar memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Belanja Barang yang memenuhi nilai kapitalisasi, menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja aset tetap dimasukkan kedalam kategori belanja modal dalam penyusunan anggaran.
4. Belanja Modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki output berupa aset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-bahan/asistensi diakui sebagai aset tetap.
5. Belanja Modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal laporan keuangan diakui sebagai aset tetap dalam kelompok kontruksi dalam pengerjaan dan diberikan penjelasan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
6. Untuk penyusunan Anggaran terkait Belanja Modal dan Belanja Barang agar memperhatikan pengertian dan elemen-elemen biaya yang dapat dikapitalisasi serta mengelompokkan setiap pengeluaran dimaksud sesuai dengan kelompok belanja yang ditentukan.

Karena itu dengan adanya permasalahan ini maka anggaran yang sudah di tetapkan tidak dapat terserap dengan optimal 100% karena adanya kendala Penggunaan anggaran belanja, jumlah belanja yang dikapitalisasi tidak dapat dikelompokkan sesuai dengan kode akun belanja modal karena kurang dari angka kapitalisasi dan menjadi barang inventaris sehingga di neraca jumlah aset tetap tidak sebesar jumlah anggaran belanja modal.

LANDASAN TEORI

Belanja Daerah

Menurut Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013, belanja daerah adalah “semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.” Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), belanja daerah adalah “semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Klasifikasi Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak mengenal adanya pembagian ke dalam bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Di samping itu, tidak ada penelompokkan ke dalam belanja administrasi umum maupun belanja operasi dan pemeliharaan. Keluarnya Permendagri No. 21/2010 sebagai pengganti Kepmendagri No. 13/2006 dikarenakan latar belakang permasalahan di tingkat implementasi antara lain banyaknya pemerintah daerah yang terlambat menetapkan APBD, rumitnya konten format KUA-PPAS, lamanya pembahasan APBD, banyaknya isian yang kurang relevan, masalah tambahan penghasilan PNSD, klasifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dan kurang jelasnya prosedur penatausahaan APBD. Berdasarkan SAP (PP No. 71/2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Belanja Modal

Menurut Halim (2009:73), “belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.” Belanja Modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal berguna untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana (Sularso, 2003:67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bersadarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan susunan organisasi Pemerintahan kota yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Setda Kota Bengkulu, dimana Bagian Keuangan Setda Kota Bengkulu terdiri dari satu kepala Bagian dan Tiga Kasubbag, yaitu: Sub Bagian Anggaran, Sub Bengkulu yang mulai ditetapkan sebagai Provinsi pada tanggal 18 November 1968 berdasarkan UU No.9/1967, bisa dikatakan sebagai salah satu provinsi termuda (provinsi ke 26) di Indonesia setelah zaman kolonial berakhir.

Selepas Bengkulu ditetapkan sebagai Propinsi pada tahun 1968, Saat itu Biro Pengelolaan Keuangan masih memakai nama Direktorat Keuangan Daerah yang berada pada lingkup Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu (atau Sekretariat Daerah sekarang). Nama Biro Pengelolaan Keuangan sendiri mulai dipakai pada tahun 1978. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 24 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Biro Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan bahan penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengelola dan membina administrasi keuangan daerah, guna menjaga likuiditas keuangan daerah.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian beserta posisi atau jabatan yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Pada suatu organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di bagian-bagian tersebut. Struktur organisasi yang mengatur tugas-tugas biro pengelolaan keuangan tergambar dalam bagan berikut ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Pengelolaan Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu



Sumber: Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Bengkulu, 2013

Data Belanja Modal dan Aset

Penelitian dilakukan dari bulan Mei-Juni 2013 dengan cara mengumpulkandata sekunder yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2008-2012 yang berhubungan dengan belanja modal dan aset tetap APBD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Berikut disajikan hasil rekapitulasi data belanja modal dan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2008-2012:

Tabel 3. Belanja Modal Dan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu 2008-2012 (Realisasi)

No	Tahun	Belanja Modal (dalam milyar)	Kenaikan/ Penurunan (%)	Aset Tetap (dalam milyar)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2008	388.314,53	-	2.106.974,73	-
2	2009	249.114,22	(55,88)	1.595.830,45	(32,03)
3	2010	165.061,96	(50,92)	1.594.694,37	(0,07)
4	2011	220.889,56	25,27	1.970.509,52	19,07
5	2012	290.264,66	23,90	1.816.950,32	(8,45)

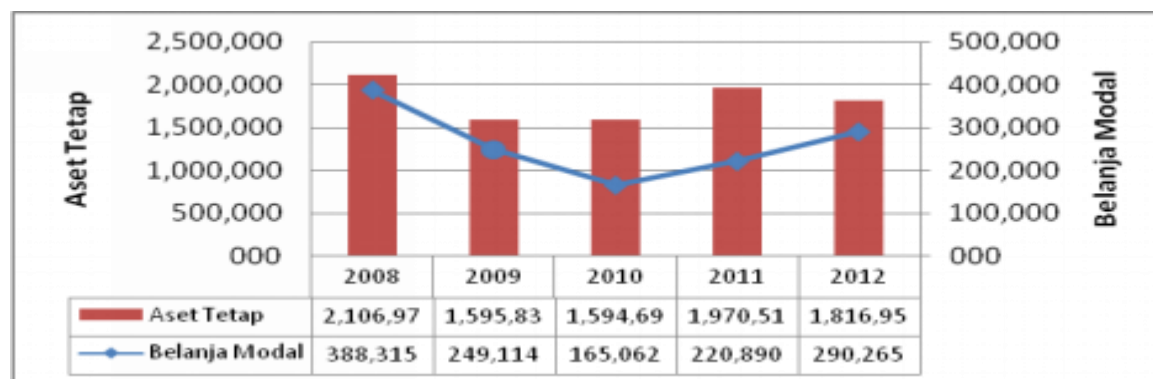
Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Prov. Bengkulu 2008-2012

Berdasarkan data di atas dapat diketahui kenaikan dan penurunan dari belanja modal pada tahun 2009 terjadi penurunan belanja modal sebesar 55,88%, tahun 2010 terjadi penurunan 50,92% sedangkan tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 25,75 dan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 23,90% jumlah belanja modal yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan pada tabel ini meningkat sedangkan aset tetap yang diperoleh adalah menurun karena disebabkan oleh realisasi belanja modal yang tidak dapat dikapitalisasikan menjadi aset tetap kerana barang tersebut dihibahkan kepada pihak lain, dan adanya kegiatan-kegiatan rehab yang dianggarkan dalam belanja modal. Yang juga tidak mencapai nilai kapitalisasi.

Untuk belanja modal yang menjadi aset tetap pada Pemda Provinsi Bengkulu berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan. Pada tahun 2009 terjadi penurunan aset tetap sebesar 32,03%, tahun 2010 terjadi penurunan kembali sebesar 0,07% sedangkan pada tahun 2011 terjadi kenaikan aset tetap sebesar19,07% dan tahun 2012 terjadi penurunan kebalik sebesar 8,45%.

Berikut disajikan data kenaikan dan penurunan belanja modal dan aset tetap Pemda Provinsi Bengkulu yang telah dikoversikan kebentuk nominal yang lebih rendah yaitu dibagi dengan satu juta rupiah.

Gambar 3. Grafik Belanja Modal dan Aset Tetap Pemda Provinsi Bengkulu tahun 2008-2012



Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Prov. Bengkulu 2008-2012

Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan maksud untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel dependen. Pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan memprediksi aset tetap. Langkah dalam perhitungan regresi linier sederhana terlebih dahulu membuat tabel kerja koefisien regresi sebagai tabel pembantu dalam perhitungan data, yakni sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Kerja Koefisien Regresi dan Korelasi

n	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	388.314,53	2.106.974,73	150.788.174.209,12	4.439.342.512.858,57	818.168.902.001,83
2	249.114,22	1.595.830,45	62.057.894.606,21	2.546.674.825.147,20	397.544.057.804,00
3	165.061,96	1.594.694,37	27.245.450.639,04	2.543.050.133.709,70	263.223.378.313,17
4	220.889,56	1.970.509,52	48.792.197.716,99	3.882.907.768.410,63	435.264.980.848,61
5	290.264,66	1.816.950,32	84.253.572.844,92	3.301.308.465.348,10	527.396.466.871,69
Σ	1.313.644,93	9.084.959,39	373.137.290.016,28	16.713.283.705.474,20	2.441.597.785.839,29

Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2013

Berdasarkan data tabel 4 di atas diketahui:

$$n = 5$$

$$X = 1.313.644,93$$

$$Y = 9.084.959,39$$

$$X^2 = 373.137.290.016,28$$

$$Y^2 = 16.713.283.705.474,20$$

$$XY = 2.441.597.785.839,29$$

Jadi penyelesaian persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{5(2.441.597.785.839,29) - (1.313.644,93)(9.084.959,39)}{5(373.137.290.016,28) - (1.313.644,93)^2}$$

$$= \frac{12.207.988.929.196,50 - 11.934.410.841.929,40}{1.865.686.450.081,40 - 1.725.663.002.114,70}$$

$$= \frac{273.578.087.267,08}{140.023.447.966,70}$$

$$= 1,954$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

Dari perhitungan di atas didapat persamaan regresi :

$$Y=1.303.671 + 1,954 X.$$

Persamaan regresi liner sederhana mempunyai makna:

- a) Konstanta $a=1.303.671$. Jika belanja modal tidak terjadi peningkatan atau konstan maka aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tetap sebesar 1.303.671.
- b) Koefisien belanja modal $b=1,954$. Jika belanja modal ditingkatkan satu-satuan maka aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 1,954.

Secara rinci prediksi nilai aset tetap Pemda Provinsi Bengkulu berdasarkan persamaan regresi yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Besarnya nilai aset tetap jika belanja modal sebesar 388.314,53

$$1.303.671 + (1,954 \times 388.314,53) = 2.062.361,16$$

b. Besarnya nilai aset tetap jika belanja modal sebesar 249.114,22

$$1.303.671 + (1,954 \times 249.114,22) = 1.790.391,32$$

c. Besarnya nilai aset tetap jika belanja modal sebesar 165.061,96

$$1.303.671 + (1,954 \times 165.061,96) = 1.626.169,85$$

d. Besarnya nilai aset tetap jika belanja modal sebesar 220.889,56

$$1.303.671 + (1,954 \times 220.889,56) = 1.735.245,93$$

e. Besarnya nilai aset tetap jika belanja modal sebesar 290.264,66

$$1.303.671 + (1,954 \times 290.264,66) = 1.870.791,13$$

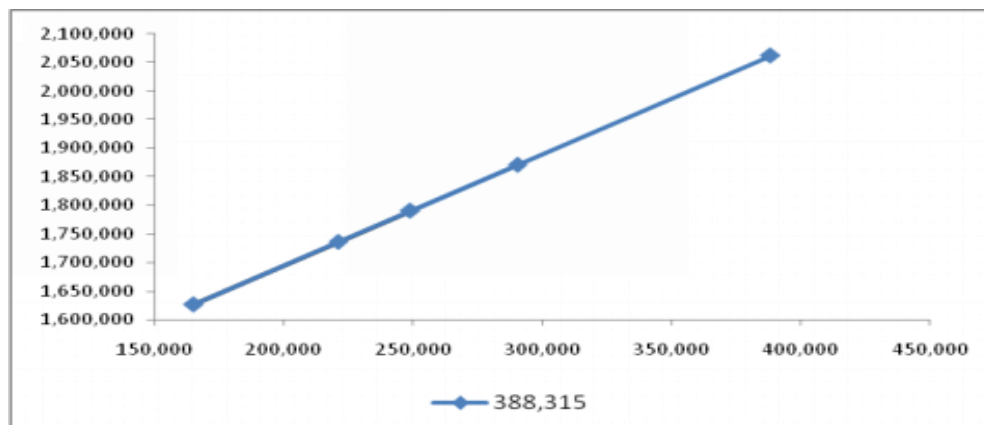
Berikut adalah tabel dan kurva prediksi Aset tetap (Y):

Tabel 5. Nilai Prediksi Aset Tetap (Y)

X	Y	Y Prediksi
388.314,53	2.106.974,73	2.062.361,16
249.114,22	1.595.830,45	1.790.391,32
165.061,96	1.594.694,37	1.626.169,85
220.889,56	1.970.509,52	1.735.245,93
290.264,66	1.816.950,32	1.870.791,13

Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2013

Gambar 4. Kurva prediksi Y (Aset Tetap)



Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2013

Analisis Korelasi Product Moment

Korelasi product moment digunakan untuk mengatui keeratan hubungan antara belanja modal dengan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dilakukan uji koefisien korelasi dengan menggunakan model:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{5(2.441.597.85.839,29 - (1.313.644,93)(9.084.959,39))}{\sqrt{5(373.137290.016,28 - (1.313.644,93)^2)} \cdot \sqrt{5(16.713.283705.474,0) - (9.084.959,39)^2}} \\
 &= \frac{12.207.98829.197-11.934.410841.929}{\sqrt{1.865.686450.081-1.725.663002.115} \sqrt{83.566.41827.371-82.536.487117.949}} \\
 &= \frac{273.578.08.267}{\sqrt{140.023.47.967} \sqrt{1.029.93409.422}} \\
 &= \frac{273.578.08.267}{(374.197)(1.014.855)} \\
 &= \frac{273.578.08.267}{379.755.90.650} = 0,720
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan korelasi product moment di atas didapat koefisien $r=0,720$. Untuk mengetahui adanya hubungan antara kedua variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), digunakan penafsiran atau interpretasi angka menurut Sugiyono (2005:149) yaitu:

<u>Interval Koefisien</u>	<u>Tingkat Hubungan</u>
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Berdasarkan interval di atas diketahui nilai berarti $r=0,720$ berada pada interval antara 0,60 – 0,799 dengan tingkat hubungan kuat. Nilai $r=0,720$ adalah positif, berarti arah hubungan belanja modal dengan aset tetap adalah positif, artinya jika belanja modal meningkat maka aset tetap juga ikut meningkat, sebaliknya jika belanja modal menurun maka aset tetap Pemda Provinsi Bengkulu juga ikut menurun.

Berdasarkan perhitungan di atas didapat t -hitung = 4,454 sedangkan nilai t -tabel pada derajat kebebasan ($df=n-2$) dan signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,353. Jadi dapat disimpulkan bahwa t -hitung (4,454) > t -tabel (2,353), artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara belanja modal terhadap aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dengan pengujian t -hitung (4,454) > t -tabel (2,353) artinya setiap ada penambahan belanja modal yang direalisasikan maka akan diikuti dengan penambahan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Tingkat keeratan hubungan antara belanja modal dengan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu adalah kuat sedangkan arah hubungan adalah positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Halim (2004:73) bahwa belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Munir (2003:36) juga menyatakan menyatakan hal senada bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penyalokannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep multi-term expenditure framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001:14). Hal ini berarti bahwa pengelolaan aset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan atau lebih luas sumber pendanaan.

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Belanja modal berbeda dengan belanja operasional dan pemeliharaan dalam hal pembuatan keputusan. Anggaran operasional dan pemeliharaan melibatkan para eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, badan, bagian, dan kantor. Sementara belanja modal, terutama infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan. Di sisi lain pembiayaan untuk kedua anggaran tersebut juga berbeda. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (fund), sedangkan pendanaan untuk belanja operasional cenderung bersumber dari pendapatan, misalnya biaya pelayanan (service charges) dan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Perbedaan yang lain adalah anggaran operasional biasanya dirancang untuk satu tahun belanja, sementara kebanyakan anggaran modal untuk beberapa periode atau tahun anggaran (Bland dan Nunn dalam Jalaluddin, 2009:76).

Secara teoritis apabila suatu organisasi melakukan suatu kebijakan untuk membelanjakan dana dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk belanja modal, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap anggaran operasional dan pemeliharaan organisasi tersebut. Bland dan Nunn (Jalaluddin, 2009:76) juga menemukan bahwa belanja modal memiliki implikasi positif yang tidak ambigu terhadap operasi di masa yang akan datang.

Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (fixed asset) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau output-nya sudah diperoleh. Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, selain diperhitungkan biaya untuk penggunaan aset tersebut dalam operasional organisasi dalam bentuk depresiasi, juga harus diperhitungkan biaya untuk pemeliharaan aset tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya (Allen dan Tommasi, 2001:14).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis regresi linier sederhana didapat persamaan $Y=1.303.671 + 1,954 X$. Persamaan ini mempunyai makna: $b=1,954$ artinya jika belanja modal ditingkatkan satu-satuan maka aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 1,954. Sedangkan nilai $a=1.303.671$ artinya jika belanja modal tidak terjadi peningkatan atau konstan maka aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tetap sebesar 1.303.671.

2. Analisis korelasi product momen didapat nilai $r=0,720$ bernilai positif, artinya meningkatnya belanja modal akan diikuti dengan meningkatnya aset tetap, sedangkan tingkat keeratan hubungan antara belanja modal dengan aset tetap adalah kuat sebab nilai koefisien korelasi berada pada interval antara $0.60 - 0,799$.
3. Pengujian hipotesis dengan uji t diketahui bahwa $t_{hitung} (4,454) > t_{tabel} (2,353)$, artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk lebih optimal dalam pemanfaatan aset daerah yang telah ada, sehingga aset tersebut memiliki nilai guna dan ditujukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi aset tetap seperti belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik tentang Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta : Selemba Empat.
- Ahyari, Agus. 2013. Efisiensi Persediaan Bahan. BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Muhamad. 2011. Analisa Penyajian Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Skripsi. Bengkulu. Universitas Dehasen
- Nazir. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Republik Indonesia.
- Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, 2013. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012. Bengkulu
- Sugiyono, 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
- Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta. Republik Indonesia.
- Wurita. 2011. Analisa Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintahan Provinsi Bengkulu Skripsi. Bengkulu. Universitas Dehasen
- Aminudin. 2015. Prinsip-Prinsip Riset Operasi. Jakarta : Erlangga.